

ABSTRAK

Perkembangan teknologi di bidang eksplorasi laut memicu timbulnya berbagai klaim atas objek bersejarah dan meningkatnya perburuan yang mengancam kelestarian objek-objek bersejarah di dasar laut. Dikarenakan penemuan tersebut mengandung nilai historis, arkeologis, sekaligus nilai komersil. Hal ini menimbulkan masalah kepemilikan atas penemuan tersebut karena banyaknya kepentingan berbagai pihak didalamnya, serta perlunya suatu instrumen hukum yang dapat melindungi warisan budaya bawah air yang kian terancam.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepemilikan warisan budaya bawah air yang ditemukan di wilayah perairan internasional dan Bagaimana perlindungan warisan budaya bawah air dalam Hukum Internasional

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Jenis data penulisan ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode Analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian mengemukakan, Kepemilikan warisan budaya di wilayah perairan internasional memang tidak secara rinci diatur konvensi internasional seperti UNCLOS 1982 dan Konvensi UNESCO 2001. Konvensi-konvensi tersebut lebih mengedepankan isu perlindungan warisan budaya bawah air, tanpa menjelaskan lebih lanjut mengenai isu kepemilikan. Sedangkan pengaturan hukum internasional mengenai warisan budaya bawah air secara umum diatur dalam UNCLOS 1982, Pasal 149 dan Pasal 303 dan secara spesifik diatur dalam Konvensi UNESCO 2001 yang mengutamakan *no commercial exploitation*. Pengaturan ini menjadikan perlindungan dan pelestarian warisan budaya menjadi prioritas bagi masyarakat internasional karena pada dasarnya setiap negara wajib melindungi dan bekerjasama guna melestarikan warisan budaya bawah air.

Kata kunci : *Warisan budaya bawah air, perlindungan hukum, UNESCO Convention, UNCLOS*

ABSTRACT

Technological developments in the field of ocean exploration lead to various claims for historic objects and the increased poaching that threatens the preservation of historic objects on the seabed. Because these discoveries contain historical, archaeological and commercial values. This raises ownership problems for the discovery because of the many interests of various parties in it, as well as the need for a legal instrument that can protect underwater cultural heritage that is increasingly threatened.

This research was conducted to find out the ownership of underwater cultural heritage found in international waters and how to protect underwater cultural heritage in International Law

The approach method in this research is normative juridical. This study uses descriptive analysis research specifications. This type of data is secondary data obtained through the study of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Qualitative data analysis methods.

Based on the results of the study, the ownership of cultural heritage in international waters is not specifically regulated by international conventions such as UNCLOS 1982 and the UNESCO Convention 2001. These conventions put forward the issue of protecting underwater cultural heritage, without further explaining the issue of ownership. While international legal arrangements regarding underwater cultural heritage are generally regulated in UNCLOS 1982, Article 149 and Article 303 and specifically regulated in the 2001 UNESCO Convention which prioritizes no commercial exploitation. This arrangement makes the protection and preservation of cultural heritage a priority for the international community because basically every country is obliged to protect and cooperate to preserve underwater cultural heritage.

Keywords: *Underwater cultural heritage, legal protection, UNESCO Convention, UNCLOS*